

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai implementasi program Warung Rakyat Direnovasi dalam upaya pemberdayaan UMKM di Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan bahwa keberhasilan Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo sangat ditentukan oleh komunikasi yang sinergis melalui tiga indikator yakni transmisi informasi yang efektif (melalui jalur birokrasi formal dan grup digital warga), kejelasan pesan (simplifikasi regulasi Peraturan Bupati Nomor. 30 Tahun 2023 agar mudah dipahami), dan konsistensi narasi birokrasi sejak awal anggaran. Keselarasan ini berhasil memitigasi tumpang tindih perintah, membangun kepercayaan publik, dan memastikan pengerjaan fisik di lapangan tepat sasaran.

Selain didukung oleh komunikasi yang efektif, keberhasilan Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo juga didorong oleh pengelolaan empat elemen sumber daya secara optimal dan saling menopang. Keterbatasan jumlah staf di tingkat dinas berhasil disiasati secara taktis lewat pembagian kerja dengan perangkat desa yang memiliki kedekatan sosiologis dengan masyarakat sebagai ujung tombak lapangan. Sinergi ini digerakkan oleh sumber daya informasi berupa basis data tunggal yang valid berbasis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 untuk mencegah ketimpangan informasi. Selain itu, pembagian otoritas diatur tegas secara *bottom-up* di mana desa melakukan verifikasi awal, kecamatan mensupervisi, dan dinas memegang keputusan final guna menghindari tumpang tindih wewenang. Keberhasilan ini kian diperkuat oleh fasilitas yang memadai,

terutama jaminan finansial melalui transfer langsung dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) ke rekening desa untuk memotong birokrasi, serta dukungan sarana digital kelurahan. Integrasi menyeluruh inilah yang akhirnya berhasil mentransformasi warung-warung tersebut menjadi ruang usaha yang kokoh, higienis, dan produktif.

Efektivitas implementasi program ini juga didorong oleh disposisi pelaksana yang sangat mendukung, yang tecermin dari keselarasan penugasan, manajemen insentif, dan tingginya kesadaran aparatur. Pola penugasan dirancang adaptif dengan menunjuk bidang yang linier di tingkat dinas dan kecamatan, serta menempatkan staf garda terdepan yang supel dan telaten di tingkat desa untuk mengasistensi warga. Kinerja personel ini digerakkan oleh manajemen insentif integratif yang memadukan anggaran operasional transparan berbasis Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 dengan penghargaan non-materiil (SKP dan piagam), sehingga efektif menutup celah praktik koruptif dan pungutan liar. Puncaknya, komitmen ini diperkuat oleh pemahaman mendalam lintas instansi yang memandang warung rakyat sebagai urat nadi ekonomi yang wajib diselamatkan. Kesadaran dan empati sosial yang tinggi ini memicu respons proaktif berupa metode jemput bola serta pendampingan totalitas di luar jam kerja, yang menghadirkan pelayanan publik yang tulus dan mengayomi pedagang kecil.

Melengkapi aspek disposisi pelaksana sebelumnya, keberhasilan program ini didukung optimal oleh tata kelola struktur birokrasi yang kokoh melalui harmonisasi SOP dan pengelolaan fragmentasi kerja. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023 bertindak sebagai SOP dan jangkar operasional yang

menyatukan ritme kerja seluruh aparat, mulai dari kendali berkas di tingkat dinas, supervisi presisi di tingkat kecamatan, hingga panduan pendaftaran dan transparansi di tingkat desa guna memitigasi keluhan warga. Sementara itu, potensi hambatan akibat pembagian tanggung jawab (fragmentasi) berhasil diatasi dengan menempatkan kecamatan sebagai jembatan birokrasi yang mengkonsolidasikan laporan dari desa ke dinas sekaligus mengeliminasi ego sektoral. Pembagian wewenang ini tidak kaku, melainkan mewujud sebagai gotong royong birokrasi yang saling melengkapi. Keterpaduan sistemik antara keteraturan SOP dan sinergi lintas instansi yang guyub inilah yang akhirnya berhasil memangkas birokrasi yang berbelit-belit, mempercepat target renovasi fisik, serta menghadirkan pelayanan publik yang solid dan kompak.

Sayangnya, dalam Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo terjadi kelumpuhan pada fase keberlanjutan. Pemerintah daerah dinilai baru menyentuh tahap pemampuan fisik melalui renovasi bangunan tempat usaha, namun masih sangat lemah dalam penguatan kapasitas dan keberlanjutan. Pasca-renovasi, para pemilik warung cenderung dilepas begitu saja tanpa adanya intervensi lanjutan. Pendekatan yang kaku ini gagal membangun kemandirian karena tidak dibarengi dengan pelatihan literasi keuangan, manajemen usaha modern, ataupun penguatan kelembagaan lokal. Akibatnya, warung rakyat baru berdaya dari segi tampilan fisiknya, tetapi belum mampu secara kapasitas manajerial untuk bersaing dalam jangka panjang.

Meskipun begitu, program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo berhasil merevitalisasi produktivitas dan kondisi sosial-ekonomi pelaku

UMKM melalui transformasi sarana usaha menjadi lebih kokoh, bersih, dan higienis. Perbaikan fisik ini memberikan kenyamanan baru yang secara linear memicu minat beli konsumen, mempercepat perputaran modal, serta meningkatkan pendapatan harian para pedagang kecil secara signifikan. Adanya lonjakan omzet harian berkisar antara 30% hingga 40% setelah renovasi. Peningkatan pendapatan ini terbukti memberikan dampak konkret yang sangat membantu para penerima manfaat dalam memutar modal belanja, menopang kebutuhan dapur keluarga, hingga membiayai sekolah anak tanpa harus berutang.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian mengenai implementasi Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo, maka diajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan konstruktif bagi pengembangan program ke depan:

- 1) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro bersama Pemerintah Kelurahan/Desa perlu membuat media informasi digital (infografis visual atau hotline resmi) yang menyederhanakan aturan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2023. Langkah ini penting untuk memitigasi terjadinya miskonsepsi awal pelaku UMKM mengenai berkas tanah atau skema bantuan tanpa harus selalu bergantung pada sosialisasi tatap muka.
- 2) Mengatasi keterbatasan staf dinas dengan mengembangkan aplikasi atau dashboard monitoring terintegrasi untuk verifikasi kelayakan fisik warung. Selain itu, pola pendampingan jemput bola (asistensi NIB dan dokumen)

oleh perangkat kelurahan/desa sebaiknya dibakukan menjadi service blueprint agar dapat direplikasi secara merata di wilayah lain.

- 3) Kelumpuhan fase keberlanjutan pada Program Warung Rakyat Direnovasi di Kabupaten Sidoarjo utamanya disebabkan oleh orientasi program yang masih terjebak pada pendekatan karitatif (charity-based approach), di mana fokus utama hanya tertuju pada pemenuhan target fisik jangka pendek berupa kuantitas warung yang diperbaiki. Sebagai saran perbaikan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo perlu segera mengintegrasikan kurikulum pelatihan manajemen usaha modern, literasi keuangan dasar, dan digitalisasi pemasaran dengan menggandeng akademisi atau sektor perbankan. Di samping itu, penguatan kelembagaan lokal perlu dilakukan melalui pembentukan paguyuban atau koperasi warung rakyat agar para pedagang memiliki posisi tawar dan jaringan distribusi yang kuat.